

**FENOMENA PENGELOLAAN PRASARANA
DI KAWASAN PERBATASAN
(Studi Kasus: Pengelolaan Persampahan di
Perumnas Pucang Gading,
Perbatasan Kota Semarang-Kabupaten Demak)**

TUGAS AKHIR

Oleh:

L. VENARIO AGIASTO

L2D 002 418



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

ABSTRAKSI

Perkembangan Kota Semarang yang cukup pesat menimbulkan perkembangan penduduk serta perkembangan aktivitas perkotaan yang pesat pula. Dengan perkembangan yang pesat ini, tentunya akan menyebabkan permintaan akan lahan yang tinggi untuk memenuhi aktivitas penduduknya, khususnya untuk aktivitas permukiman. Di Semarang, permintaan lahan untuk aktivitas permukiman meningkat dengan cepat. Salah satu tujuan perkembangan permukiman di pinggiran kota adalah kawasan perbatasan. Salah satu daerah perbatasan yang menjadi tujuan perkembangan permukiman adalah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Fenomena ini ditandai dengan munculnya kompleks perumahan di sekitar jalur Semarang-Mranggen, salah satunya adalah Perumnas Pucang Gading.

Perkembangan suatu daerah sebagai kawasan permukiman tentu akan diikuti oleh permintaan penyediaan akan sarana prasarana yang mendukung aktivitas permukiman. Hal ini juga terjadi di Perumnas Pucang Gading, di mana permintaan akan sarana dan prasarana permukiman sangat tinggi. Salah satu pengelolaan sarana dan prasarana yang diminta oleh masyarakat adalah pengelolaan persampahan. Masyarakat meminta pemerintah untuk menyediakan pengelolaan persampahan, karena mereka menganggap pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah. Di Perumnas Pucang Gading, pengelolaan persampahan menjadi isu yang melibatkan kedua pemerintahan yang berbatasan, yakni pemerintah Kabupaten Demak dan pemerintah Kota Semarang. Isu tersebut dapat menjadi sinyal positif dari kedua pemerintahan, yakni timbulnya kerja sama untuk mengelola persampahan di kawasan perbatasan, ataupun sinyal negatif yaitu timbulnya konflik dan saling lempar tanggung jawab antara kedua pemerintahan yang berbatasan.

Perkembangan kawasan perbatasan dalam hal ini Perumnas Pucang Gading ternyata membawa dampak bagi hubungan antara pemerintah Kabupaten Demak dan pemerintah Kota Semarang, oleh karena itu maka dirasakan perlu dilakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi di kawasan perbatasan serta pengelolaan persampahan di kawasan perbatasan. Fenomena ini dilihat dari pengaruh keruangan dari Perumnas Pucang Gading sendiri sebagai wilayah perbatasan, serta fenomena pengelolaan sampah di Perumnas Pucang Gading. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan pengamatan lapangan. Data yang didapat dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif dan komparatif serta kajian fenomenologi sehingga menghasilkan temuan studi maupun kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil akhir yang dicapai dari penelitian ini adalah perkembangan interaksi yang terjadi di Perumnas Pucang Gading sebagai kawasan perbatasan ternyata lebih dipengaruhi oleh perkembangann Kota Semarang karena faktor lokasi dan aksesibilitas, serta aktivitas ekonomi dan sosial penduduk perumnas Pucang Gading juga dipengaruhi oleh Kota Semarang dari pada Kabupaten Demak. Kemudian dalam pengelolaan persampahan, terjadi fenomena yang menarik yakni timbulnya kerja sama yang dilakukan oleh kedua pemerintahan serta pembagian tugas dalam pengelolaan sampah di Perumnas Pucang Gading. Di sisi lain, juga timbul peran aktif dari sektor swasta serta swadaya dari masyarakat sendiri dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan hasil studi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terjadi ekstensifikasi wilayah dari Kota Semarang ke wilayah Kabupaten Demak di Kecamatan Mranggen, yang terjadi dalam perubahan tata guna lahan di kawasan perbatasan. Kemudian dari fenomena yang muncul dalam pengelolaan persampahan di Perumnas Pucang Gading, menunjukkan bahwa pelayanan prasarana di suatu daerah perbatasan sebenarnya tidak dipengaruhi oleh batas wilayah, namun pemerintahan mana yang sanggup menyediakan, maka dia bisa menyediakan pelayanan tersebut untuk masyarakat. Sehingga rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah peninjauan kembali terhadap kawasan perbatasan serta perlu pengembangan kerja sama antara pemerintah yang berbatasan, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih optimal.

Kata kunci: kawasan perbatasan, pengelolaan, sampah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan kehidupan suatu kota tidak dapat dipisahkan dari tingkat perkembangan masyarakatnya dan proses interaksi antar komponen perkotaan yang terjadi. Kota akan berkembang seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan infrastruktur, perkembangan tata guna lahan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Perkembangan suatu kota tidak hanya menimbulkan dampak positif saja bagi kehidupan masyarakat kota, namun dampak negatif yang terjadi juga tidak dapat dihindari, karena juga ikut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di kota tersebut.

Semakin berkembang suatu kota, akan diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk dan akan memberikan peningkatan permintaan akan ketersediaan lahan sebagai kawasan tempat tinggal atau perumahan, kawasan tempat bekerja, dan kawasan rekreasi menjadi permasalahan yang mendasar di perkotaan. Terbatasnya ketersediaan lahan yang ada di pusat-pusat kota telah berpengaruh terhadap nilai dan harga lahan, yaitu meningkatnya harga dan nilai lahan secara signifikan dari tahun ke tahun. Adanya fenomena peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan di kawasan pusat kota telah berimplikasi terhadap pola perkembangan kota, yaitu dengan berkembangnya kawasan-kawasan di pinggiran kota, yang notabene mempunyai harga lahan lebih murah dibandingkan pusat kota. Untuk mengatasi berbagai kendala sosial dan ekonomi di kawasan pusat kota, sebagian penduduk lebih memilih untuk berdomisili di kawasan pinggiran (sub-urban) yang memiliki harga lahan yang relatif terjangkau dengan tingkat kenyamanan yang relatif tinggi pula. Kondisi ini umumnya terjadi di kota-kota besar negara berkembang seperti di Indonesia. Tingginya permintaan akan lahan yang murah menyebabkan terjadinya perkembangan kawasan pinggiran kota yang cukup pesat, yang ditandai dengan peruntukan lahan untuk permukiman.

Salah satu daerah pinggiran kota yang menjadi tempat tujuan bagi perkembangan kawasan perkotaan adalah daerah perbatasan. Daerah perbatasan sebenarnya merupakan daerah muka suatu kota, karena secara langsung pasti berbatasan dengan daerah kota atau desa yang lain yang merupakan daerah tetangganya. Dan akan menimbulkan kesan pertama terhadap orang yang memasuki kota tersebut. Daerah perbatasan diminati karena masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh kota tersebut ataupun daerah tetangganya.

Perbatasan daerah sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan wilayah penegakkan peraturan daerah, pembangunan dan pengembangan kawasan. Dengan perbatasan yang jelas, pemerintah daerah dapat mengetahui secara jelas sejauh mana mereka dapat

menjalankan kewajiban dan kewenangannya, termasuk dalam konteks pengelolaan pemanfaatan sumber daya, pengembangan investasi pembangunan dan pengaturan kehidupan penduduknya. Tanpa adanya perbatasan yang jelas, kewajiban dan kewenangan yang dilakukan oleh satu pemerintah daerah dapat masuk ke wilayah pemerintahan daerah tetangganya. Jika pemerintah daerah tetangga tidak dapat menerima kondisi tersebut, maka konflik-konflik pembangunan antar daerah dapat muncul dan berkembang. Konflik antar daerah dapat menyebabkan terganggunya hubungan antar daerah, yang pada kelanjutannya menyebabkan terganggunya keberlangsungan pembangunan di daerah-daerah yang saling berbatasan tersebut. Pada akhirnya, konflik ini dapat menyebabkan penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi mereka dengan lancar.

Kawasan perbatasan mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kawasan lainnya di wilayah perkotaan. Bila kawasan fungsional kota sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang dominan di kawasan tersebut, kawasan perbatasan sangat dipengaruhi oleh garis batas administratif yang terdapat di dalamnya. Karakteristik yang paling menonjol dari adanya garis batas wilayah di kawasan perbatasan antar daerah adalah bahwa di kawasan tersebut terdapat pertemuan pengaruh kewenangan yang berasal dari dua daerah atau lebih.

Karakteristik yang jelas dapat dilihat dari perkembangan kawasan khususnya dalam bidang infrastruktur yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan kawasan fungsional lainnya. Satu-satunya perkembangan yang cukup pesat mungkin hanya perkembangan di bidang perumahan. Hal ini disebabkan pemerintah setempat “kurang memperhatikan” kawasan tersebut, karena pemerintah daerah masih merasa bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan sangat rentan terhadap ancaman dari daerah tetangganya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah menganggap kawasan perbatasan merupakan daerah yang rentan, dia antaranya adalah karena keengganan pemerintah daerah menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan kawasan kepada daerah tetangganya, atau sebaliknya, karena keengganan untuk menunjukkan potensi yang terdapat di kawasan perbatasan yang menyebabkan kecurigaan dapat dimanfaatkan oleh daerah tetangganya.

Di samping itu, faktor lokasi juga menyebabkan tidak diperhatikannya kawasan perbatasan. lokasi kawasan perbatasan yang pada umumnya berada di daerah pinggiran, yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan kota atau kabupaten menyebabkan “lepas” dari perhatian pemerintah daerah yang biasanya pusat pemerintahannya berada di pusat kota. Akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, pertumbuhan investasi pembangunan bagi kawasan perbatasan menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kawasan tersebut lebih rendah dari kawasan lainnya.

Karena menjadi tempat bertemunya dua atau lebih daerah, maka kawasan perbatasan sebenarnya memiliki potensi bagi pengembangan kerja sama antar daerah. Pengembangan kerja sama antar daerah di kawasan perbatasan dapat terjadi bila di kawasan tersebut terdapat potensi

yang hanya dapat dikembangkan oleh daerah-daerah yang memiliki pengaruh di kawasan perbatasan tersebut. Sebagai contoh apabila salah satu daerah memiliki suatu potensi sumber daya, misalnya sumber air bersih, maka daerah yang lain dapat memanfaatkannya dengan memberikan retribusi sebagai konsekuensinya yang besarnya ditentukan secara bersama oleh kedua pemerintah daerah. Hal ini juga untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang lain seperti halnya sarana persampahan. Pengelolaan sampah sebenarnya merupakan pengelolaan yang dihindari oleh pemerintah daerah, karena tidak dapat menghasilkan keuntungan. Apalagi hal ini bila terjadi di daerah perbatasan. Pemerintah kedua daerah yang berbatasan seperti saling melemparkan tanggung jawab pengelolaan sampah. Sebenarnya melalui kerja sama yang baik, sinergi antara kedua pemerintah akan menjadi pendorong pertumbuhan tidak hanya di kawasan perbatasan saja, tetapi juga berpengaruh terhadap kawasan lain di kedua daerah tersebut.

Hal seperti ini terdapat di beberapa daerah di Kota Semarang yang berada di kawasan perbatasan seperti halnya terjadi di Perumnas Pucang Gading Kecamatan Mranggen, yang merupakan wilayah perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Di kawasan ini, kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya bertempat di daerah perbatasan. Fenomena ini juga menyebabkan penyediaan sarana prasarana serta pengelolaannya untuk melayani masyarakat, seperti pengelolaan sampah juga melintasi perbatasan, yang berarti melibatkan yakni pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah Kabupaten Demak.

Secara administratif Perumnas Pucang Gading termasuk dalam wilayah Kabupaten Demak, sehingga kebutuhan akan sarana prasarana di Perumnas Pucang Gading seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkab Demak. Kenyataannya di bidang persampahan, baru pada tahun 2004 Pemerintah Demak mengusahakan pelayanannya. Sebelum itu masyarakat Pucang Gading berswadaya dalam pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPA. Pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan tentu saja sangat terlambat mengingat keberadaan Perumnas Pucang Gading sudah cukup lama. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Kabupaten Demak yang belum mempunyai susunan pemerintahan yang cukup lengkap ternyata belum memiliki instansi tersendiri yang mengurus persampahan. Hal ini membuat Dinas Kimtaru dan Kimpraswil Demak merasa kewalahan mengurus sampah di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Padahal Kimtaru tidak hanya mengurus sampah saja, masih banyak kepentingan-kepentingan yang lainnya. Pengelolaan sampah dipegang oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak, namun dalam operasional di lapangan Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak mencoba bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota Semarang karena keterbatasan alat yang ada. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pengelolaan secara teknis di lapangan serta menimbulkan fenomena yang lain dibandingkan dengan wilayah yang lain yang urusan pengelolaan sampah dikelola oleh satu pemerintahan saja. Dinas Kebersihan Kota Semarang membantu pengelolaan karena pemerintah Kota Semarang menginginkan timbal balik